

## PENGARUH RETRIBUSI DAERAH, PAJAK DAERAH DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI BALI

Agung Pramarta<sup>1</sup>  
Luh Putu Aswitari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Bali, Indonesia.  
e-mail: [agungpramt@yahoo.co.id](mailto:agungpramt@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah maupun daerah yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukannya sumber-sumber pembiayaan dari pusat maupun daerah. Sumber pembiayaan dari pusat yaitu dana perimbangan sedangkan sumber pembiayaan dari kemampuan daerah yaitu pendapatan asli daerah. Kontribusi retribusi dan pajak daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dirasa sangat membantu pendapatan asli daerah untuk pemerintah daerah dalam mengurangi beban pemerintah pusat. Jika pendapatan asli daerah meningkat maka pembangunan daerah akan lebih optimal. Retribusi dan pajak yang dikelola oleh daerah, termasuk juga oleh pemerintah daerah Provinsi Bali. Penelitian ini menguji pengaruh retribusi daerah, pajak daerah dan jumlah penduduk secara serempak, juga secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali. Dari hasil uji F menunjukkan variabel retribusi daerah, pajak daerah dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan dalam uji parsial atau uji t menunjukkan bahwa hanya pajak daerah yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan retribusi daerah dan jumlah penduduk tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

**Kata Kunci:** *Retribusi daerah, Pajak daerah, jumlah penduduk, Pendapatan Asli Daerah*

### ABSTRACT

*One of the goals to be achieved by the government and the region is the welfare of society. In achieving these objectives it is necessary to source financing from the central and regional. Source of funding from the center of the balance fund while the source of financing of regional capability that is the original revenue area. The contribution of local taxes and taxes that have been established with the legislation is very helpful to the local revenue for the local government in reducing the burden of the central government. If local revenue increases, regional development will be more optimal. Levies and taxes managed by the region, as well as by the provincial government of Bali. This study examines the effect of regional levies, local taxes and the number of inhabitants simultaneously, also partially to the original income of the province of Bali. From the results of F test shows the variable levy area, local taxes and the number of residents have a positive and significant impact on local revenue (PAD). While in partial test or t test indicates that only local taxes that have positive and significant to the original income of the region. While the area retribusi and the number of population does not have a negative and significant effect on the local revenue.*

**Keywords:** *Local Levies, Local Taxes, Population, Local Revenue*

## **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang disatukan oleh beribu-ribu pulau dalam satu pemerintahan. Kesatuan ini dibagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dipisahkannya pemerintahan pusat dan daerah bertujuan untuk menjalankan pemerintahan agar lebih efektif. Pemerintahan daerah tersebut diberikan tugas oleh pemerintah pusat untuk mendirikan kebijakan-kebijakan yang sesuai bagi daerah-daerahnya sendiri dengan dasar hukum yang berlaku oleh pemerintah pusat. Berdasarkan “UU No. 32 tahun 2004: kewenangan luas diberi kepada Kabupaten atau Kota disesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang masing-masing daerah miliki. Pemerintah daerah berhak dan bertanggung jawab dalam hal ini memberikan maupun mengatur kebijakan yang akan diberlakukan di daerahnya sendiri dan yang sesuai bagi daerahnya untuk melaksanakan pemerintahan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memberikan dan mengatur kebijakan tentunya pemerintah daerah perlu untuk mengumpulkan dana yang besar, fungsinya agar pembangunan berkelanjutan nanti dapat optimal. Pembangunan yang optimal diharapkan akan membuat masyarakat sejahtera dan akan lebih baik jika pembangunan didukung dengan dana dan sumber daya manusia yang baik agar lebih efektif. Sumber dana ini diberikan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Otonomi daerah mampu menciptakan perubahan yang positif di daerah dalam hal kewenangan daerah lebih mandiri. Perubahan di antara pusat dan daerah semenjak adanya otonomi daerah memberi perubahan signifikan. Kebijakan-kebijakan tersebut memberi kesempatan untuk

pemerintah daerah guna mengoptimalkan sumber dana mereka melalui pendapatan asli daerah. Adanya otonomi daerah diharapkan bagi seluruh daerah untuk dapat berdiri sendiri dalam menjalankan kebijakan yang telah diambil. Dengan kata lain, otonomi daerah bertujuan untuk membentuk kemandirian atau mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat Indonesia (Aprilia, 2015).

Otonomi daerah bisa memberikan perubahan yang positif di daerah dikarenakan memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Kewenangan tersebut menjadi harapan dikarenakan sistem pemerintahan memusat cenderung menjadikan daerah sebagai subjek pembangunan yang kurang penting. Berubahnya bentuk hubungan antara pusat dan daerah sejak otonomi daerah memberikan dampak yang cukup signifikan, diantaranya pada pengelolaan keuangan oleh daerah otonom dikarenakan menjalankan desentralisasi. Kebijakan desentralisasi itu membuka kesempatan untuk pemerintah di daerah memaksimalkan pendapatan asli daerah.

Menurut Oka (2015) kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan. Menurut Kembar (2013) pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan dan merupakan salah satu dampak nyata atas keberhasilan dari beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada waktu sebelumnya

Guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah ini, pemerintah daerah berusaha untuk mencari sumber dana yang potensial dengan cara memaksimalkan sumber-

sumber pendapatan asli daerah yang sudah dikumpulkan selama ini. Pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab pemerintah dan pembangunan juga membutuhkan sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Kebutuhan tersebut sangat diperlukan daerah utamanya sejak diterapkannya otonomi daerah di Indonesia. Adanya otonomi daerah akan memacu daerah agar lebih berinovatif dalam mencari sumber penerimaan daerah yang bisa menopang pengeluaran daerah. Menurut Mahadi (1993) pajak dikumpulkan oleh pemerintah provinsi Indonesia dan merupakan sumber pendapatan asli mereka yang paling penting. Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam RAPBD 2018 Pemprov Bali mendapatkan sorotan tajam dari kalangan DPRD Bali. Bagaimana tidak, ini karena penerimaan PAD dalam RAPBD 2018 hanya sebesar Rp 3,317 triliun atau turun sebesar Rp 96 miliar (2,81 persen) dari PAD dalam APBD induk 2017 sebesar Rp 3,413 triliun. Anggota Komisi I DPRD Bali, Komang Agus Sewi Putra mengatakan, retribusi daerah yang menjadi bagian dari PAD Pemprov Bali dalam APBD induk 2017 dianggarkan sebesar Rp 48,73 miliar. Namun karena alasan realisasi tidak mencapai target dan adanya penyederhanaan administrasi yang mengutamakan pelayanan yang cepat dan sistem peningkatan pengendalian dan pengawasan, dalam APBD 2017 turun menjadi Rp 46,82 miliar (Tribun Bali, 2017).

Menurut Allingham dan Sandmo (2002) permasalahan yang sering terjadi adalah pemerintah daerah diberikan wewenang dalam mengatur daerahnya sendiri guna mengatur aktivitas ekonomi, pemerintah daerah akan kurang efisien dalam pengeluaran namun mereka tidak mampu untuk meningkatkan penerimaan untuk

mendukung pengeluaran mereka. Menurut Manik (2014) dalam upaya pembangunan ekonomi di Indonesia, pemerintah menguatkan sektor yang bisa menjangkau masyarakat kecil, sektor yang berkontribusi paling besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Menurut Garcia (1998) Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang baik ditandai dengan PDB provinsi yang meningkat. Salah satu aturan dalam implementasi desentralisasi fiskal adalah harus memperbesar kewenangan pajak dan peningkatan penerimaan daerah (Lin, 2000).

**Tabel 1 Perkembangan Nilai Retribusi Daerah Provinsi Bali Kurun waktu Tahun 2002-2016.**

<b>Tahun</b>	<b>Retribusi Daerah(Rp)</b>	<b>Perkembangan (%)</b>
2002	2.414.101.000	-
2003	3.396.757.000	1.41
2004	6.522.653.000	1.92
2005	9.693.181.000	1.49
2006	11.684.380.000	1.21
2007	15.321.960.000	1.31
2008	18.949.030.000	1.24
2009	21.111.558.000	1.11
2010	20.940.232.000	0.99
2011	33.541.288.000	1.60
2012	50.545.903.000	1.51
2013	32.012.802.000	0.63
2014	71.324.628.000	2.23
2015	59.852.453.000	0.84
2016	63.858.566.000	1.07

*Sumber: BPS Bali Dalam Angka 2003- 2017.*

Pekembangan retribusi daerah di Provinsi Bali dapat dilihat dalam tabel 1 yang menunjukkan perkembangan nilai retribusi daerah di Provinsi Bali selama kurun waktu 2002 hingga 2016 yang selalu mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, daritahun 2002-2009 retribusi Bali mengalami peningkatan yang signifikan hingga

mencapai angka 21.111.558.000, kemudian tahun 2010 menurun menjadi 20.940.232.000, tahun 2011-2012 retribusi daerah provinsi Bali mengalami kenaikan dari 33,5 milyar ke 50,5 milyar kemudian disusul tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 18,5 milyar yang menjadikan total retribusi daerah tahun 2013 hanya 32 milyar. Tahun 2014 kembali meningkat sangat pesat retribusi daerah Bali mencapai 71,3 milyar kemudian menurun lagi di tahun 2015. Tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan. Data ini menunjukkan retribusi daerah Bali sangat berfluktuatif.

Sumber pendapatan yang dipungut adalah pajak daerah dan retribusi daerah sebagai asal penerimaan yang bersumber dari daerah itu sendiri dan bisa dikelola berdasarkan keadaan masing-masing daerah secara optimal. Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah, nantinya bisa membiayai daerah guna melaksanakan otonominya, juga mampu mandiri baik daerahnya sendiri. Sumber penerimaan yang diterima oleh daerah sebagian besar adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang didapatkan dari meninjau potensi-potensi yang maksimal dari daerah tersebut. Harapannya, sumber pendapatan dapat menolong pembiayaan daerah dalam menjalankan otonomi agar pemerintah sanggup berdiri sendiri tanpa bantuan/subsidi dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Tabel 2, pajak daerah di Provinsi Bali selama kurun waktu 2002 hingga 2016. Jika dilihat pada Tabel 3 Pajak Daerah di Provinsi Bali meningkat hingga tahun 2005 lalu menurun di tahun 2006 hingga 2007. Tahun 2008 hingga

2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan Pajak Daerah di Provinsi Bali relatif meningkat.

**Tabel 2 Perkembangan Nilai Pajak Daerah Provinsi Bali Kurun Waktu Tahun 2002-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>Perkembangan (%)</b>
2002	325.287.156.000	-
2003	331.000.000.000	1.02
2004	508.913.728.000	1.54
2005	663.349.780.000	1.30
2006	638.538.480.000	0.96
2007	629.011.000.000	0.99
2008	945.973.962.000	1.50
2009	1.027.714.551.000	1.09
2010	1.221.182.092.000	1.19
2011	1.494.728.074.000	1.22
2012	1.813.341.219.000	1.21
2013	2.202.392.550.000	1.21
2014	2.517.432.371.000	1.14
2015	2.571.035.791.000	1.02
2016	2.593.093.541.000	1.01

*Sumber: BPS Bali Dalam Angka 2003- 2017.*

Provinsi Bali dalam menjalankan pemerintahan menjadikan Pendapatan Asli Daerah andalan guna memberikan pelayanan dan perkembangan di daerahnya melalui sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Sumber pajak daerah guna menjadi sumber dana dalam menjalankan pemerintahan, serta



membangun daerah untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan rakyat yang lebih baik (Bambang, 2005). Pemerintah daerah memiliki sedikit pajak otonomi dan prioritas pusat ketat membatasi paling pendanaan dari pusat (Gustav, 2006).

**Tabel 3    Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Bali Kurun waktu Tahun  
2002-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Perkembangan (%)</b>
2002	3.090.497	-
2003	3.139.022	1,016
2004	3.179.918	1,013
2005	3,247,772	1,021
2006	3.310.307	1,019
2007	3.372.880	1,019
2008	3.409.845	1,011
2009	3.471.952	1,018
2010	3.522.300	1,015
2011	3.957.600	1,124
2012	4.007.200	1,013
2013	4.056.300	1,012
2014	4.104.900	1,012
2015	4.152.800	1,012
2016	4.200.100	1,011

*Sumber: BPS Bali Dalam Angka 2003- 2017*

Menurut tabel 3 kenaikan jumlah penduduk terjadi setiap tahunnya di Provinsi Bali. Tahun 2002 jumlah penduduk provinsi Bali adalah 3 juta jiwa hingga tahun 2016 jumlah penduduk provinsi Bali mencapai 4,2 juta jiwa. Jumlah ini terus meningkat tiap tahunnya di Provinsi Bali. Penduduk juga diharapkan dapat membantu aktivitas ekonomi dan memajukan ekonomi dalam upaya kemajuan teknologi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. Banyaknya jumlah penduduk yang dioptimalkan diharapkan mampu mewujudkan tujuan pemerintah daerah dalam melakukan otonomi daerah dan pembangunan ekonomi di daerah tersebut.

Menurut tabel 4 Pendapatan Asli daerah selalu meningkat selama kurun waktu 2002 hingga 2016 yang berfluktuasi dari tahun ke tahun, tahun 2002-2005 meningkat hingga 742,886,074,000, kemudian tahun 2006 mengalami penurunan menjadi 729,338,160,000, tahun berikutnya tahun 2007 hingga 2015 mengalami peningkatan mencapai 3,041,266,607,000, lalu menurun di tahun 2016 menjadi 3,041,195,258,000. Menurut Kusuma (2016) Potensi pendapatan asli daerah dalam mencukupi anggaran belanja daerah sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan ekonomi, namun pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan lancar jika hanya memberatkan kepada pemerintah. Penerimaan Daerah juga mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada penerimaan pemerintah pusat (Devas, 2006).

**Tabel 4 Perkembangan Nilai Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Kurun Waktu Tahun 2002-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah(Rp)</b>	<b>Perkembangan (%)</b>
2002	465.749.523.000	-
2003	382.092.277.000	0,820
2004	559.681.588.000	1,465
2005	742.886.074.000	1,327
2006	729.338.160.000	0,982
2007	834.475.055.000	1,144
2008	1.057.791.777.000	1,268
2009	1.163.947.522.000	1,100
2010	1.393.730.257.000	1,197
2011	1.723.807.096.000	1,237
2012	2.042.091.096.000	1,185
2013	2.529.976.147.000	1,239
2014	2.920.416.697.000	1,154
2015	3.041.266.607.000	1,041
2016	3.041.195.258.000	0,999

*Sumber: BPS Bali Dalam Angka 2003- 2017*

Besarnya pendapatan daerah juga digunakan sebagai suatu tingkat kemakmuran di berbagai daerah, desentralisasi fiskal yang dilakukan pemerintah daerah akan mengundang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sebuah daerah. Vasquez (2001: 423) juga menyatakan jika desentralisasi fiskal mengedepankan pendanaan publik, hingga desentralisasi diharapkan memiliki dampak langsung pada PDRB yang

nantinya menandakan bahwa adanya pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Pemerintah daerah diharapkan akan memiliki pembangunan sosial ekonomi bagi penduduk daerah setempat yang maju (Akudugu, 2012). Namun Bodman *et al.* (2009) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal secara teoritis memiliki makna yaitu perubahan kekuasaan dan beban fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang mampu berdampak menciptakan peningkatan ataupun pengurangan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat terwujud jika pemerintah daerah menerapkan kebijakan-kebijakan yang baik (Cooray, 2009).

Daerah memiliki kemampuan sumber penirimaan daerah, merupakan salah satu tanda bahwa pemerintah daerah sudah siap dalam berotonomi. Maka dari itu penerimaan retribusi daerah dan pajak daerah di arahkan guna meningkatkan ataupun menstabilkan pendapatan asli daerah, yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat langsung. Kebijakan-kebijakan dilakukan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan penerimaan pendapatan daerah dari waktu ke waktu. Pajak dan retribusi yang dibebankan pemerintah daerah harus berjalan bersamaan dengan distribusi adil atas beban dari pengeluaran pemerintah di masyarakat secara keseluruhan (Sato dan Shinji, 2000). Kemampuan retribusi daerah dan pajak daerah yang diperoleh daerah, adalahn salah satu acuan bahwa merintah daerah sudah siap melakukan otonomi daerah.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan retribusi daerah dan pajak daerah bertujuan untuk peningkatan pendapatan asli daerah, yang dipakai dalam

menyelenggarakan otonomi daerah tersebut, yang diharapkan mempunyai kemampuan nyata serta bertanggung jawab dan mampu dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemampuan ini juga diharapkan berasal dari kemampuan mengelola penerimaan retribusi daerah dan pajak daerah melalui aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan yang diberlakukan sehingga terjadi peningkatan penerimaan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah daerah menjalankan fungsi dan kewajiban pemerintah daerah guna pelaksanaannya sebagai kewenangan fiskal, daerah wajib dapat menyadari potensi dan mengelola sumber-sumber daya yang ada di daerahnya. Pemerintah daerah diuntut untuk lebih paham dalam mengenali dan mengkaji asal muasal dari keuangan guna memenuhi kebutuhan pengeluaran pemerintah serta pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Sumber PAD berasal dari retribusi daerah, pajak daerah dan juga dari sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut demi majunya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

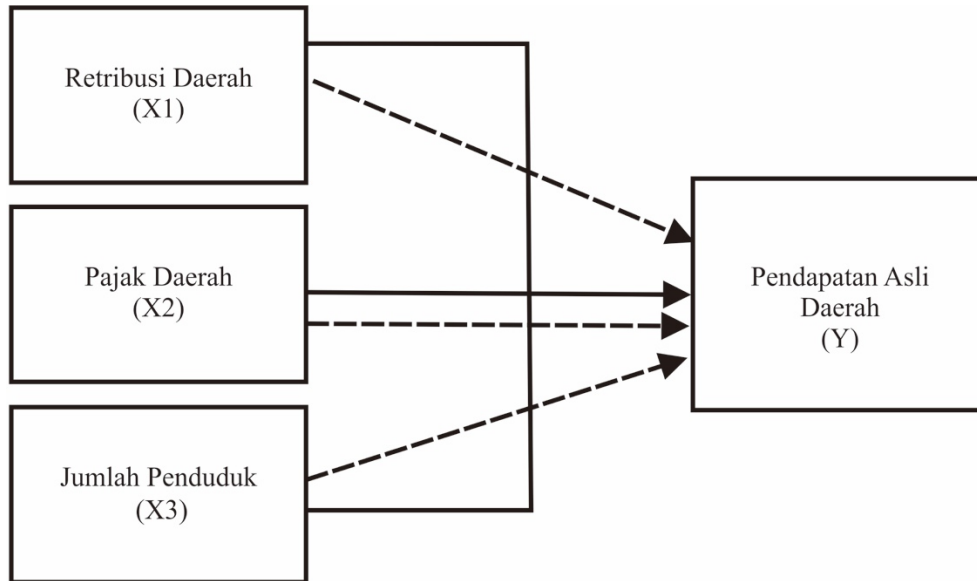
## **METODOLOGI**

Desain penelitian ini adalah kuantitatif yang berbentuk asosiatif, dengan tujuan mengetahui pengaruh retribusi daerah, pajak daerah dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah provinsi Bali tahun 2002-2016. Dalam penelitian ini retribusi daerah ( $X_1$ ), pajak daerah ( $X_2$ ) dan jumlah penduduk ( $X_3$ ) digunakan sebagai faktor faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah ( $Y$ ) di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variable independen. Variabel pendapatan asli daerah di Provinsi Bali ( $Y$ ) adalah sebagai variabel dependen. Variabel independen

disini adalah retribusi daerah (X1), pajak daerah (X2) dan jumlah penduduk (X3). Penelitian ini dilakukan dengan observasi non perilaku untuk data Peranan wilayah dalam pembentukan PDB nasional (dalam persen) tahun 2016, data Retribusi Daerah di Provinsi Bali tahun 2002-2016, data Pajak daerah di Provinsi bali tahun 2002-2016, data Jumlah Penduduk di Provinsi bali tahun 2002-2016 dan data Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bali tahun 2002 -2016. Penelitian ini data sekunder meliputi data Peranan wilayah dalam pembentukan PDB nasional (dalam persen) tahun 2016, data Retribusi Daerah di Provinsi Bali tahun 2002-2016, data Pajak daerah di Provinsi bali tahun 2002-2016, data Jumlah Penduduk di Provinsi bali tahun 2002-2016 dan data Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bali tahun 2002-2016 Provinsi Bali yang didapat dari Badan Pusat Statistik Indonesia dan Provinsi Bali.

Rregresi linier berganda digunakan sebagai metode analisi data pada penelitian ini. Kerangka konsep dari penilitian ini adalah:

**Gambar 1 Kerangka konsep**



Keterangan :   
 —————> = Pengaruh secara serempak X1,X2,X3 terhadap Y  
 - - - - -> = Pengaruh secara parsial X1,X2,X3 terhadap Y

Berdasarkan kerangka konseptual adapun model regresi linear berganda dijelaskan oleh persamaan berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_i \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Pendapatan Asli Daerah
- a = Intersep/konstanta
- X<sub>1</sub> = retribusi daerah
- X<sub>2</sub> = pajak daerah
- X<sub>3</sub> = jumlah penduduk
- β<sub>1</sub> ... β<sub>2</sub> = Slope garis regresi yang menunjukkan nilai Y akibat dari perubahan satu unit X
- e<sub>i</sub> = Variabel pengganggu (*residual error*) mewakili faktor lain berpengaruh terhadap Y tetapi tidak dimasukkan dalam model.

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

**Tabel 5** Perkembangan Nilai Retribusi Daerah Provinsi Bali Kurun waktu Tahun 2002-2016

Tahun	Retribusi Daerah(Rp)
2002	2,414,101,000
2003	3,396,757,000
2004	6,522,653,000
2005	9,693,181,000
2006	11,684,380,000
2007	15,321,960,000
2008	18,949,030,000
2009	21,111,558,000
2010	20,940,232,000
2011	33,541,288,000
2012	50,545,903,000
2013	32,012,802,000
2014	71,324,628,000
2015	59,852,453,000
2016	63,858,566,000

*sumber: BPS Bali Dalam Angka 2003- 2017.*

Berdasarkan Tabel 5, perkembangan nilai retribusi daerah Provinsi Bali pada kurun waktu 2002 sampai 2016 yang berfluktuatif, sebagai berikut tahun 2002-2009 retribusi Bali mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai angka 21,111,558,000, kemudian tahun 2010 menurun menjadi 20,940,232,000, tahun 2011-2012 retribusi daerah provinsi Bali mengalami kenaikan dari 33,5 milyar ke



50,5 milyar kemudian disusul tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 18,5 milyar yang menjadikan total retribusi daerah tahun 2013 hanya 32 milyar. Tahun 2014 kembali meningkat sangat pesat retribusi daerah Bali mencapai 71,3 milyar kemudian menurun lagi di tahun 2015. Tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan. Data ini menunjukkan retribusi daerah Bali sangat berfluktuatif.

**Tabel 6 Perkembangan Nilai Pajak Daerah Provinsi Bali Kurun Waktu Tahun 2002-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah</b>
2002	325,287,156,000
2003	331,000,000,000
2004	508,913,728,000
2005	663,349,780,000
2006	638,538,480,000
2007	629,011,000,000
2008	945,973,962,000
2009	1,027,714,551,000
2010	1,221,182,092,000
2011	1,494,728,074,000
2012	1,813,341,219,000
2013	2,202,392,550,000
2014	2,517,432,371,000
2015	2,571,035,791,000
2016	2,593,093,541,000

*Sumber: BPS Bali Dalam Angka 2003-2017.*

Prospek pajak daerah di Provinsi Bali terlihat dalam Tabel 6, yang menggambarkan tingkat pajak daerah di Provinsi Bali selama kurun waktu 2002 hingga 2016. Jika dilihat pada Tabel 6 Pajak Daerah di Provinsi Bali meningkat

hingga tahun 2005 lalu menurun di tahun 2006 hingga 2007. Tahun 2008 hingga 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan Pajak Daerah di Provinsi Bali relative meningkat.

Menurut tabel 7 peningkatan jumlah penduduk terjadi setiap tahunnya di Provinsi Bali. Tahun 2002 jumlah penduduk provinsi Bali adalah 3 juta jiwa hingga tahun 2016 jumlah penduduk provinsi Bali mencapai 4,2 juta jiwa.

**Tabel 7 Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Bali Kurun Waktu Tahun 2002-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
2002	3.090.497
2003	3.139.022
2004	3.179.918
2005	3,247,772
2006	3.310.307
2007	3.372.880
2008	3.409.845
2009	3.471.952
2010	3.522.300
2011	3.957.600
2012	4.007.200
2013	4.056.300
2014	4.104.900
2015	4.152.800
2016	4.200.100

*Sumber: BPS Bali Dalam Angka 2003- 2017*

PAD merupakan penerimaan daerah yang berumber dari sektor pajak dan retriubsi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil peneglolaan keakyaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Untuk menciptakan otonomi daerah, maka pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu semakin digencarkan, supaya mencapai keseimbangan antar pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta mendukung terbentuknya aparat yang bersih dan bertanggung jawab.

**Tabel 8 Perkembangan Nilai Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Kurun Waktu Tahun 2002-2016.**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>
2002	465,749,523,000
2003	382,092,277,000
2004	559,681,588,000
2005	742,886,074,000
2006	729,338,160,000
2007	834,475,055,000
2008	1,057,791,777,000
2009	1,163,947,522,000
2010	1,393,730,257,000
2011	1,723,807,096,000
2012	2,042,091,096,000
2013	2,529,976,147,000
2014	2,920,416,697,000
2015	3,041,266,607,000
2016	3,041,195,258,000

*Sumber: BPS BALI DALAM ANGKA 2011 – 2017 (data diolah)*

Menurut tabel 9 Pendapatan Asli daerah selalu meningkat selama kurun waktu 2002 hingga 2016 yang berfluktuasi, tahun 2002-2005 meningkat hingga 742,886,074,000, kemudian tahun 2006 mengalami penurunan menjadi 729,338,160,000, tahun berikutnya tahun 2007 hingga 2015 mengalami peningkatan mencapai 3,041,266,607,000, lalu menurun di tahun 2016 menjadi 3,041,195,258,000. Menurut Kusuma (2016) Potensi pendapatan asli daerah dalam mencukupi anggaran belanja daerah sagnat dibutuhkan dalam prooses pembangunan ekonomi, namun pembagnunan ekonomi tidak dapat berjalan lancar jika hanya memberatkan kepada pemerintah.

### Analisis Regresi Linear

**Tabel 9 Hasil *Coefficients* Pengaruh Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali**

		<b>Coefficients<sup>a</sup></b>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-10,210	7,024		-1,454	,174
	LnRetribusi Daerah	-,024	,072	-,036	-,340	,740
	LnPajak Daerah	,849	,149	,874	5,691	,000
	Ln Jumlah Penduduk	1,002	,645	,162	1,554	,148

a. Dependent Variable: LnY

Berdasarkan hasil output spss maka fungsi bidang regresi bergandanya, sebagai berikut:

$$\text{LnY} = -10,210 - 0,240\text{LnX}_1 + 0,849\text{LnX}_2 + 1,002\text{LnX}_3$$

Dari bidang regresi berganda tersebut dilakukan uji sebagai berikut

### Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas Residual

**Tabel 10 Hasil Uji Normalitas Rersidual**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,05921725
Most Extreme Differences	Absolute	,171
	Positive	,171
	Negative	-,102
Test Statistic		,171
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Tesst distribution is Normal.

b. Calculsated from data.

c. Lilliefosrs Significance Correction.

d. This is a lodwer bound of the true significance.

Berdasarkan tabel 10, diketahui bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0.171 dengan tingkat signifikansi pada *Asymp.Sig.(2-tailed)* yaitu sebesar 0.200. Nilai tersebut lebih kecil dari  $\alpha = 5$  persen (0.05), hal ini menyatakan bahwa

data sudah terdistribusi normal atau lulus uji normalitas dan model pertama yang dibuat adalah layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

### Uji Multikolinieritas

**Tabel 11 Hasil Uji Multikolinieritas**

		Coefficients <sup>a</sup>	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	LnRetribusi Daerah	,331	3,017
	LnPajak Daerah	,347	2,883
	Ln Jumlah Penduduk	,284	3,516

a. Dependent Variable: LnY

Berdasarkan Tabel 11 dapat diketahui bahwa semua variabel dalam model regresi yang pertama dengan variabel terikat pendapatan (Y1) yang digunakan memiliki nilai *Tolerance* melebihi 10 persen (0.10) dan seluruh nilai VIF pada model regresi tersebut memiliki nilai dibawah 10, hal tersebut menunjukkan bahwa pada model regresi pertama tidak terdapat gejala multikolinieritas sehingga model tersebut kemudian dapat digunakan untuk memprediksi dan analisis lebih lanjut.

**Uji Autokorelasi****Tabel 12 Hasil uji autokorelasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,996 <sup>a</sup>	,993	,991	,06681	1,824

a. Predictors: (Constant), LnX3, LnX1, LnX2

b. Dependent Variable: LnY

Berdasarkan tabel 13 dapat diketahui angka dari Durbin-Watson pada penelitian ini sebesar 1.824. Karena nilai dubit-Watson ada di antara 1.65 dan 2.35 maka diambil kesimpulan bahwa penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi.

**Uji Heteroskedastisitas****Tabel 13 Hasil Uji Heteroskedasitas**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,087	,020		4,247	,001
	LnRetribusi Daerah	,018	,024	,367	,744	,472
	LnPajak Daerah	-,005	,025	-,107	-,221	,829
	Ln Jumlah Penduduk	,006	,057	,054	,102	,921

a. Dependent Variable: Absolut Residual

Berdasarkan tabel 13 menunjukkan bahwa tingkat signifikan dari variabel bebas pada model yang digunakan tidak berpengaruh signifikan terhadap absolut residual karena tingkat signifikansi seluruh variabel bebas bernilai diatas 5 persen (0.05), sehingga dapat disimpulkan model regresi pertama yang digunakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

### **Uji Signifikansi Koefisien Regresi Secara serempak**

Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah (X1) pajak daerah (X2) jumlah penduduk (X3) terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali (Y), secara serempak menggunakan uji F. Dari hasil uji  $F_{hitung}=513,522$  dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,796, yang berarti  $F_{hitung}>t_{tabel}$  atau nilai sig = 0,000  $<\alpha$  0.05, maka  $H_0$  ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel retribusi daerah, pajak daerah dan jumlah penduduk secara serempak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Bali kurun waktu 2002-2016.

Nilai probabilitas dari pengaruh simultan yang diperoleh dari regresi dengan bantuan SPSS yaitu bernilai 0.000 kurang dari  $\alpha = 5$  persen (0.05), hal tersebut menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah, pajak daerah dan jumlah penduduk secara serempak berpengaruh signifikan padapendapatan asli daerah diProvinsi Bali.

### **Uji Signifikansi Koefisien Regresi Secara Parsial**

Dari hasil analisis  $t_{hitung}$  sebesar -0,240, dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,796 dan Sig sebesar 0,740  $> \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  diterima, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa



retribusi daerah secara tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kurun waktu 2002-2016.

Hasil uji mendapatkan  $t_{hitung}$  sebesar 5,691, dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,796, , atau dengan nilai probabilitas untuk variable pajak daerah (X2)  $0,000 < \alpha = 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kurun waktu 2002-2016. Koefisien beta X2 sebesar 0,849, memberi arti jika pajak daerah meningkat satu satuan persen maka pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,849%, koefisien bernilai positif artinya antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah berhubungan positif. Kenaikan pendapatan pajak daerah akan mengakibatkan kenaikan pada pendapatan asli daerah

Hasil uji mendapatkan  $t_{hitung}$  sebesar 1,554 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,796, atau dengan nilai probabilitas untuk variabel jumlah penduduk (X3) sebesar  $0,148 > \alpha = 0,05$  berarti  $H_0$  diterima, jadi disimpulkan bahwa jumlah penduduk secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kurun waktu 2002-2016.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasar pada hasil analisis data penelitian dan mengacu pada tujuan penelitian yang sudah diuraikan pada bab pendahuluan, maka simpulan yang dapat disampaikan sekaligus yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang diajukan.

Secara serempak, retribusi daerah, pajak daerah dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan pada PAD di Provinsi Bali. Variabel retribusi daerah

secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan pada PAD di Provinsi Bali. Variabel pajak daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Bali. Variabel jumlah penduduk secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Bali.

Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bali ditentukan oleh beberapa faktor yang berpengaruh. Untuk menambah kontribusi yang dihasilkan dengan hasil analisis serta simpulan, makapeneliti mengajukan saran sebagai berikut.

Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bali sebaiknya berkonsentrasi untuk meningkatkan penerimaan daerah dan pada khususnya penerimaan Pajak Daerah karena Pajak Daerah akan Berpengaruh pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah akan semakin mudah membiayai kegiatan-kegiatan dan keperluan daerah yang nantinya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berpengaruh terhadap peningkatan fasilitas-fasilitas bagi masyarakat Provinsi Bali. Dengan kata lain, adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan meningkatkan kesejahteraan penduduk Provinsi Bali. Peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD) harus didukung pula oleh peningkatan kualitas dari para pejabat pemerintah Provinsi Bali. Pajak dan retribusi daerah yang diterima dapat disalurkan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Bagi peneliti lain Penulis menyadari masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini, baik dari segi jumlah data

yang hanya terbatas 15 tahun, serta pembahasan mengenai pendapatan daerah yang hanya berfokus pada pajak daerah, retribusi daerah dan jumlah penduduk..Diperlukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas, karena hasil yang diperoleh bisa saja berbeda apabila dilakukan pada daerah lain di Indonesia. Agar penelitian lebih baik, penelitian lebih lanjut sebaiknya dilakukan dalam kurun waktu lebih dari 15 tahun. Agar penelitian lebih jelas dan lengkap sebaiknya selain pajak daerah, retribusi daerah dan jumlah penduduk juga dijabarkan sehingga dapat dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## REFRENSI

- Akudugu, Jonas Ayaribila. 2012. *Accountability In Local Government Revenue Management: Who Does What?. Journal Of Sustainable Develpoment. 2(2)*
- Aprilia, Ni Luh Kesuma. 2015. Analisis Sektor Unggulan Dan Pergeseran Pangsa Sektor-Sektor Ekonomi Kabupaten Klungkung. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Vol8 No.1*
- Bambang, PrakosaKesit. 2005.*Pajak Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta, UII press
- Badan Pusat Statistik 2017. BPS Provinsi Bali
- 2003. Provinsi Bali Dalam Angka 2002.Bali: BPS Bali.
- 2004. Provinsi Bali Dalam Angka 2003.Bali: BPS Bali.
- 2005. Provinsi Bali Dalam Angka 2004.Bali: BPS Bali.
- 2006. Provinsi Bali Dalam Angka 2005.Bali: BPS Bali.
- 2007. Provinsi Bali Dalam Angka 2006.Bali: BPS Bali.
- 2008. Provinsi Bali Dalam Angka 2007.Bali: BPS Bali.
- 2009. Provinsi Bali Dalam Angka 2008.Bali: BPS Bali.
- 2010. Provinsi Bali Dalam Angka 2009.Bali: BPS Bali.
- 2011. Provinsi Bali Dalam Angka 2010.Bali: BPS Bali.
- 2012. Provinsi Bali Dalam Angka 2011.Bali: BPS Bali.
- 2013. Provinsi Bali Dalam Angka 2012.Bali: BPS Bali.
- 2014. Provinsi Bali Dalam Angka 2013.Bali: BPS Bali.
- 2015. Provinsi Bali Dalam Angka 2014.Bali: BPS Bali.
- 2016. Provinsi Bali Dalam Angka 2015.Bali: BPS Bali.
- 2017. Provinsi Bali Dalam Angka 2016.Bali: BPS Bali.
- 2017. Laporan Keuangan Indonesia 2017.

- Bodman, P., Kelly Ana Heaton and Heaton and Andrew Hodge. 2009. *Fiscal Decentralisation and Economic Growth: A Bayesian Model Averaging Approach*. MRG@UQ Discussion Paper, School of Economics, University of Queensland.
- Cooray, Arusha. 2009 Government Expenditure, Governance and Economic Growth. Ww.palgrave-journals.com. vol 51: 401-418
- Devas, Nick. 2006. "Local Taxation in Indonesia: Opportunities for Reform". *Bulletin of Economic Indonesia*.
- Dwi, Sri Wahyuli. 2010. "Analisis Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah Di Kabupaten Blitar". *Jurnal Universitas Brawijaya*
- Garcia, Jorge dan Lana Soelistianingsih. 1998. Why Do Differences in Provincial Incomes Persist in Indonesia?. *Bulletin of Indonesia Economics Studies*. Vol. 34 No. 1
- Gustav, Ranis. 2006. "Desentralisasi in Indonesia". *Bulletin Of Economic Indonesia*
- Kembar, Made Sri Budhi. 2013. Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Bali: Analisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol6 No. 1
- Kesit, Bambang Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: UII Press.
- Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor 174 Tahun 1997 *tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah*
- Kusuma, Hendra. 2016. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol 9 No. 1.
- Mahadi, Khairul dan Larry Schroeder. 1993. Provincial Motor Vehicle Taxation in Indonesia. *Bulletin of Indonesia Economics Studies*. Vol. 29 No. 3
- Manik, Ayu Pratiwi. 2014. Analisis Efisiensi Dan Produktivitas Industri Besar Dan Sedang Di Wilayah Provinsi Bali (Pendekatan Stochastic Frontier Analysis). *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol 7 No. 1
- Munawir. 1990. *Perpajakan*. Jakarta: Liberty.
- Oka, I Komang Artana Yasa dan Sudarsana Arka. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol8 No.1
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 *tentang Retribusi Daerah*.
- Sato, M. dan Shinji Y. 2000. Decentralization and Economic Development in Asia Countries. Hitotsubashi. *Journal of Economics*. Vol. 41 no. 2 Hal 84.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 1-14 2011. *Tentang Pajak Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Perpajakan*.
- undang undang nomor 28 tahun 2009. *Tentang Pajak Dan Retribusi*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. *Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.*

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Vasquez, Jorge Martinez and Robert M. Mc-Nab. 2001. Fiscal Decentralization, Macrostability, and Growth. *Journal of Political Econom.* 68: 423-435.

Document Lain

[www.djpk.depkeu.go.id/document.php/document/article/619/835](http://www.djpk.depkeu.go.id/document.php/document/article/619/835)/diakses 1 Desember 2017

<http://bali.tribunnews.com/2017/10/15/pad-pemprov-bali-turun-rp-96-miliar-bapenda-genjot-pajak-dua-sektor-ini> diakses 12 Desember 2017